



LAPORAN KINERJA

2017



PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2018



**“Terwujudnya Ternate menjadi Kota Berbudaya,
Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan
Berwawasan Lingkungan”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Ternate Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

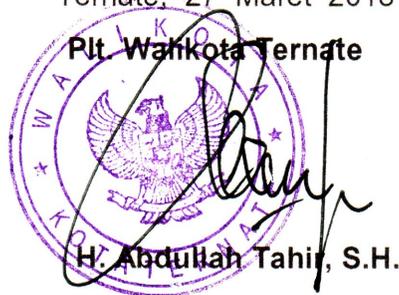
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagaimana yang ditetapkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Ternate, sekaligus sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

Terlaksananya target kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 tidak lepas dari kerja sama dan kerja keras dari Aparat Pemerintah Kota Ternate dan seluruh stakeholder baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak tersebut.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 ini menjadi bahan masukan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Ternate pada masa yang akan datang.

Ternate, 27 Maret 2018

Plt. Walikota Ternate



H. Abdullah Tahir, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2021. Tahun 2016 adalah tahun transisi sehingga pentargetan kinerja sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2016-2017 dimulai tahun 2017. Berdasarkan RPJMD tersebut dibuatlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

Dari hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 diketahui rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate mencapai 103,46% yang bermakna **Baik Sekali**. Dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2016-2021 terdapat 5 (lima) Misi 10 (sepuluh) Tujuan dan 15 (lima belas) Sasaran, dengan 51 (lima puluh satu) indikator Sasaran. Pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

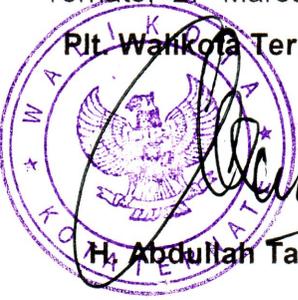
- Misi 1 terdapat 5 tujuan, 7 sasaran, 26 indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran: sebanyak 11 indikator sasaran atau 42,31% berada pada katagori baik sekali (melampaui target), 14 indikator sasaran atau 53,85% berada pada katagori baik dan 1 indikator sasaran atau 3,85% berada pada katagori cukup .
- Misi 2 terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 7 Indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran: 1 Indikator sasaran atau 14,29% berada pada katagori baik sekali (melampaui target), 6 indikator sasaran atau 85,72% berada pada katagori baik.
- Misi 3 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran, 8 indikator asaran dengan capaian indikator sasaran: sebanyak 4 indikator sasaran atau 50,00% berada pada

katagori baik sekali (melampaui target), 4 indikator sasaran atau 50,00% berada pada katagori baik.

- Misi 4 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran: sebanyak 5 indikator sasaran atau 83,34% berada pada katagori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 16,67% berada pada katagori baik.
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran dengan capaian indikator sasaran: sebanyak 2 indikator sasaran atau 50,00% berada pada katagori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 50.00% berada pada katagori baik.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 dengan Nilai capaian Rata-rata 103,46% atau bermakna **Baik Sekali** tersebut, menjadi masukan bagi Pemerintah Kota untuk berkinerja lebih baik lagi sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kota Ternate kedepan akan lebih baik.

Ternate, 27 Maret 2018

Rit. Walikota Ternate

H. Abdulrahman Tahir S.H.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR -----	i
IKHTISAR EKSEKUTIF -----	ii
DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR TABEL -----	v
DAFTAR GAMBAR -----	vii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 LATAR BELAKANG -----	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN -----	1
1.3 GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE -----	2
1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH -----	6
1.5 KEPEGAWAIAN -----	8
1.6 KEWENANGAN -----	9
1.7 PERTUMBUHAN EKONOMI -----	11
1.8 PROGRAM PEMBANGUNAN -----	11
1.9 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN -----	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA -----	32
2.1. RENCANA STRATEGIS -----	32
2.1.1`Visi -----	32
2.1.2 Misi -----	36
2.1.3 Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah -----	41
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA -----	50
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 -----	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA -----	55
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA -----	55
3.1.1 Penetapan Kategori Nilai Capaian -----	55
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja -----	55
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA -----	60
3.3 TREND CAPAIAN KINERJA -----	85
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017 -----	85
3.4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah -----	86
3.4.2 Pengelolaan Belanja Daerah -----	88
3.4.3 Kondisi Pembiayaan Daerah -----	89
BAB IV P E N U T U P -----	91
LAMPIRAN:	
1. Pengukuran Kinerja	
2. Perjanjian Kinerja	
3. Pernyataan Telah Di Reviu Oleh Inspektorat Kota Ternate	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Wilayah Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan -----	3
Tabel 1.3.	Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	8
Tabel 1.4.	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Ternate Tahun -----	9
Tabel 2.1.	Matrik Hubungan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Dan Indikator sasaran -----	46
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021 -----	50
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 ---	51
Tabel 3.1.	Penetapan Katagori Nilai Capaian -----	55
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	55
Tabel 3.3.	Kategori Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	57
Tabel 3.4.	Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2017-----	58
Tabel 3.5.	Persentase katagori pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	58
Tabel 3.6.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	60
Tabel 3.7.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	64
Tabel 3.8.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	67
Tabel 3.9.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	68
Tabel 3.10.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	69
Tabel 3.11.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	71
Tabel 3.12.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	72
Tabel 3.13.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	74
Tabel 3.14.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	75
Tabel 3.15.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	76
Tabel 3.16.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	78
Tabel 3.17.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	80
Tabel 3.18.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	81
Tabel 3.19.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	83

Tabel 3.20.	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 -----	84
Tabel 3.21.	Realisasi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017 -----	87
Tabel 3.22.	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 Per 31 Desember 2017 -----	89
Tabel 3.23.	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017 -----	91

Daftar Gambar

Tabel 1.2.	Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate -----	4
------------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap penyelenggara pemerintahan membuat laporan kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah melalui Laporan Kinerja yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Ternate dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Ternate kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Ternate

1.3 Gambaran Umum Kota Ternate

1.3.1 Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu. Selanjutnya pada akhir tahun

2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel 1.1

Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Ternate Utara	14
2	Ternate Tengah	15
3	Ternate Selatan	17
4	Pulau Ternate	6
5	M o t i	6
6	Hiri	6
7	Batang Dua	6
8	Ternate Barat	7
Jumlah		77

1.3.2 Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,03 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Maka
7. Pulau Mano
8. Pulau Gurida

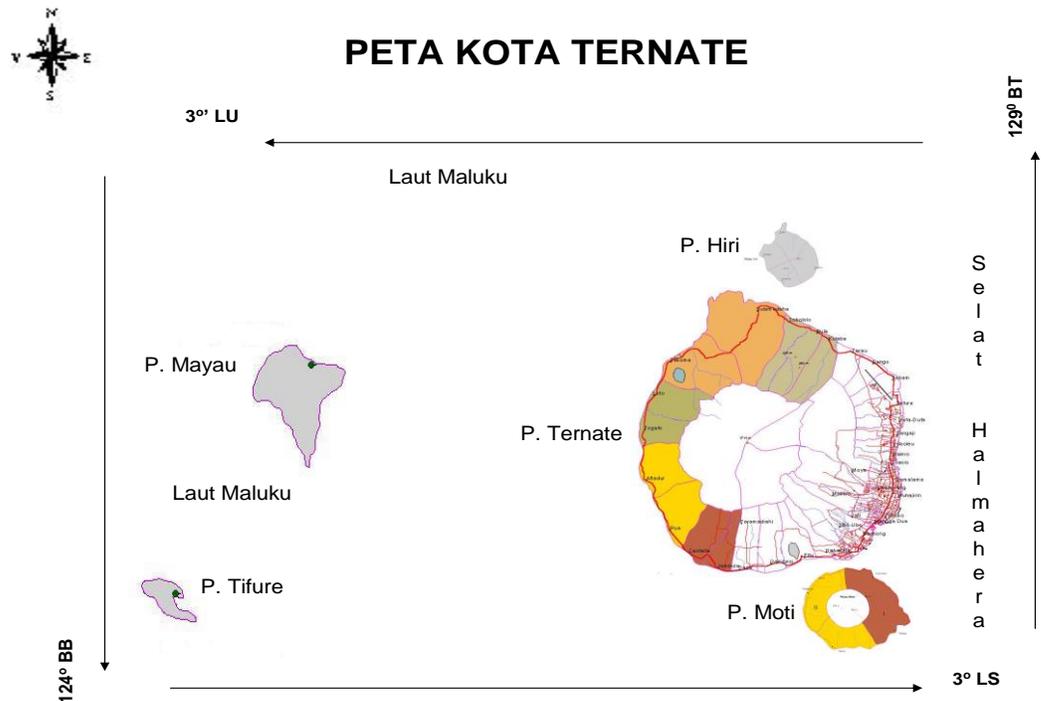
Gambar 1.2

Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate

1.3.3 Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

1. *Rogusal:*
 - Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti
2. *Rensika:*
 - Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida



1.3.4 Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

1.3.5 Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2017 sebanyak 218.028 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan Ternate Selatan 75.019 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 53.341 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 61.839 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 16.892 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 5.001 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.812 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 3.124 jiwa.

1.4 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, sampai dengan akhir tahun 2017 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) 24 (dua puluh empat) organisasi Dinas Daerah;
- 4) 6 (enam) organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 2 (dua) Perusahaan Daerah;
- 7) 8 (delapan) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 8) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

Tipe perangkat daerah tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Ternate Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kota Ternate Tipe B;
3. Inspektorat Kota Ternate Tipe A;

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate Tipe A;
5. Dinas Kesehatan Kota Ternate Tipe A;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Tipe B;
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tipe A;
8. Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Tipe A;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tipe A;
10. Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate Tipe A;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Tipe A;
12. Dinas Pertanian Kota Ternate Tipe A;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate Tipe A;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate Tipe A;
15. Dinas Pariwisata Kota Ternate Tipe A;
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate Tipe A;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tipe A;
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ternate Tipe A;
19. Dinas Perhubungan Kota Ternate Tipe A;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate Tipe A;
21. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Ternate Tipe B;
22. Dinas Sosial Kota Ternate Tipe A;
23. Dinas Kebakaran Kota Ternate Tipe A;
24. Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate Tipe B;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kota Ternate Tipe A;
26. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate Tipe A;

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Tipe ;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate Tipe ;
29. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate Tipe A;
30. Badan Perencana Pembagunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tipe A;
31. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate Tipe A;
32. Kecamatan Kota Ternate Selatan Tipe A;
33. Kecamatan Kota Ternate Tengah Tipe A;
34. Kecamatan Kota Ternate Utara Tipe A;
35. Kecamatan Kota Ternate Barat Tipe A;
36. Kecamatan Pulau Ternate Tipe A;
37. Kecamatan Pulau Hiri Tipe A;
38. Kecamatan Pulau Moti Tipe A;
39. Kecamatan Pulau Batang Dua Tipe A.

1.5 KEPEGAWAIAN

Sampai dengan akhir 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Ternate sebanyak 4.838 orang yang terdiri dari Laki-laki 1.843 orang dan Perempuan 2.995 orang, perinciannya pada tabel di bawah ini:

Tabel: 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

1. NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD/SEDERAJAT	10	0	10
2.	SLTP/SEDERAJAT	19	2	21

3.	SLTA/SEDERAJAT	699	797	1.496
4.	DIPLOMA I	14	18	32
5.	DIPLOMA II	44	268	312
6.	DIPLOMA III	79	309	388
7.	DIPLOMA IV	22	32	54
8.	DOKTER SPESIALIS	5	7	12
9.	STRATA I	884	1.514	2.398
10.	STRATA II	63	48	111
11.	STARATA III	4	0	4
JUMLAH		1.843	2.995	4.838

1.6 KEWENANGAN

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.4

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Ternate

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2	Kesehatan	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-

5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	-
6	Sosial	-
NO.	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1	Tenaga Kerja	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
3	Pangan	-
4	Pertanahan	-
5	Lingkungan Hidup	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-
8	Perhubungan	-
9	Komunikasi dan Informatika	-
10	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
11	Penanaman Modal	-
12	Kepemudaan dan Olah Raga	-
13	Persandian	-
14	Kebudayaan	-
15	Perpustakaan	-
16	Kearsipan	-
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1	Kelautan dan Perikanan	Perikanan dan Kelautan
2	Pariwisata	-
3	Pertanian	-
4	Perdagangan	-
5	Kehutanan	-
6	Perindustrian	-

1.7 PERTUMBUHAN EKONOMI

Track record pertumbuhan ekonomi Kota Ternate 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2013 sebesar 7,67 %, tahun 2014 sebesar 8,76%, tahun 2015 mencapai 8,10 %, dan tahun 2016 sebesar 8,02%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mencapai 8,07%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp. 8.512,81 milyar, meningkat dari tahun 2016 yaitu 7.877,13 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6.254,30 milyar meningkat dari tahun 2016 yang realsasinya Rp. 5.787,27 milyar.

Target pertumbuhan ekonomi Ternate yang tinggi tahun 2017 dapat dicapai dengan adanya kondisivitas wilayah seperti stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam pengembangan usaha. Selain itu juga tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas serta memadainya infrastruktur transportasi barang, jasa, kapital serta aksesibilitas komunikasi dan informasi. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut mendorong tumbunya pendapatan perkapita di Kota Ternate. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp.38.155.043 lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 36.128.993,-.

1.8 PROGRAM PEMBANGUNAN

Program Prioritas Pembangunan Kota Ternate yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut

- 1. Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, Pengendalian Tata Ruang Berbasis Lingkungan Serta Penataan Kawasan Rawan Bencana.**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut

1. Menata pemanfaatan tata ruang kota sesuai peruntukannya dengan tetap menjaga kapasitas daya dukung ruang yang tersedia;
 2. Menerbitkan berbagai regulasi terkait tata ruang sebagai upaya untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012-2032;
 3. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari berbasis pada konsepsi pembangunan berkelanjutan;
 4. Penyusunan peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;
 5. Sosialisasi peta mitigasi bencana alam secara terpadu dalam rangka mengantisipasi bencana alam;
 6. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan logistik bencana alam; dan
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan untuk membantu evakuasi bencana alam.
- 2. Program Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan Serta Pemberdayaan UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan Rumusan kebijakan umum.**

Untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kota untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian makro daerah melalui pengembangan sektor jasa, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk menopang perekonomian masyarakat;
 2. Membangun dan memperkuat kelembagaan perekonomian masyarakat berbasis pengelolaan potensi lokal secara terpadu;
 3. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung penguatan kelembagaan perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil;
 4. Membuka berbagai akses kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dalam upaya untuk memperkuat permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 5. Pembangunan dan penyebaran berbagai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3. Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya Serta Infrastruktur Pendukung Untuk Mendorong Ternate Sebagai Icon Kota Religius, Kota Pariwisata Unggulan dan Kota Pusaka Dunia Berbasis Sejarah Budaya dan Bahari.**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan terhadap berbagai jenis cagar budaya sebagai kekayaan budaya lokal untuk menjadi bagian dari pengembangan sektor pariwisata di Kota Ternate;

2. Membangun dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam upaya penguatan nilai keagamaan dan promosi sektor pariwisata sebagai komoditi unggulan lokal;
3. Membangun dan mengembangkan infrastruktur kota untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah budaya dan pariwisata bahari; dan
4. Membangun pusat informasi daerah sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata Kota Ternate.

4. Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Kepulauan Berbasis Maritim dan Pesisir.

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur di wilayah kepulauan untuk mendukung sektor maritim dan pembangunan wilayah pesisir;
2. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah ekonomi produk unggulan wilayah pesisir dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir;
3. Membangun berbagai infrastruktur kelautan dalam upaya membangun konektivitas program poros maritim terpadu; dan
4. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur dasar wilayah kepulauan berbasis maritim dan pesisir.

5. Program Mewujudkan Konektivitas Lintas Wilayah Terdekat, Mendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis Ketahanan Pangan

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk mendukung konektivitas lintas wilayah dalam rangka pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan;
 2. Memperkuat perekonomian daerah dalam rangka mendukung konektivitas lintas wilayah berbasis ketahanan pangan;
 3. Mewujudkan ketersediaan pangan utama masyarakat dalam upaya membangun ketahanan pangan;
 4. Membangun dan memperkuat fondasi perekonomian masyarakat dalam upaya menyiapkan pengembangan ekonomi terpadu berbasis ketahanan pangan; dan
 5. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi daerah dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi terpadu.
- 6. Program Pembangunan Kota Baru wilayah Selatan Sebagai Kawasan Penyangga Dalam Rangka Keseimbangan dan Pemerataan Pertumbuhan Pembangunan Antar Kawasan.**

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengembangkan berbagai infrastruktur dalam pembangunan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar kawasan;
2. Merumuskan dan menyiapkan berbagai regulasi daerah untuk mendukung tumbuhnya kota baru di selatan sebagai kawasan penyangga;
3. Meningkatkan promosi dan sosialisasi pengembangan kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga; dan
4. Melakukan pengendalian tata ruang pada kota baru di wilayah selatan sebagai kawasan penyangga.

7. Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis Potensi dan Karakteristik Wilayah

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan sesuai karakteristik wilayahnya;
2. Membangun dan mengembangkan berbagai infrastruktur untuk pengembangan kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan;
3. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi daerah yang mendukung iklim investasi pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan; dan
4. Mengendalikan pemanfaatan tata ruang pada kawasan strategis di wilayah utara, tengah dan selatan.

8. Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas.

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut diatas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang terjangkau oleh masyarakat;
2. Menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat;
3. Mendata dan memetakan jumlah penduduk yang masih memerlukan pelayanan dasar yang dapat dijangkau; dan
4. Menyediakan berbagai dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

9. Program Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Mengedepankan Akuntabilitas dan Percepatan Akses Pelayanan di Bidang Perizinan serta Mengerahkan Birokrasi yang Inovatif Berbasis Investasi dan Entrepreneur

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menerbitkan berbagai regulasi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan akuntabilitas dan percepatan akses pelayanan dibidang perijinan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang terlibat dalam pemberian pelayanan di bidang perijinan;
3. Meningkatkan pengetahuan sumber daya aparatur melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam upaya mengembangkan inovasi berbasis investasi dan entrepreneur; dan
4. Menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis investasi dan entrepreneur.

10. Program Penyediaan dan Konservasi Air Baku.

Rumusan kebijakan umum untuk mendorong terwujudnya pencapaian target program prioritas Visi, Misi tersebut di atas, dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan mengenai jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat;
2. Pembangunan jaringan pipa air bersih sampai ke rumah penduduk;
3. Menambah kapasitas jaringan air baku sesuai kebutuhan; dan
4. Membangun berbagai infrastruktur air bersih.

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan antara target sasaran program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ternate terpilih dengan rumusan kebijakan umum yang ditempuh untuk mencapai target sasaran dimaksud, dapat dilihat sebagaimana data dan informasi yang terdapat pada tabel di bawah ini.

1.9 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2016-2021 adalah:

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
- b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.
- c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.

- d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
- e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
- f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
- g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh Walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh Walikota.

2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a) Tidak seimbang pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani,

nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

- d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

- a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integrative*.

- f) Terbaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
- g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukiman tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- b) Penataan *drainase* dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
- c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

- a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.

- b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- c) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.
- d) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- e) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- f) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atorang* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- g) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.

- h) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai religiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- i) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

6. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

7. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksi antara gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kota Ternate bertekad akan menggali secara maksimal berbagai

potensi pendapatan asli daerah yang selama ini belum dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien, adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Permasalahan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Masi belum tertatanya birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, responsif, partisipatif, efektif, efisien, adil, demokratis dan akuntabel.
- b. Belum terselenggaranya pelayanan publik yang profesional, yang dapat dimaknai pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah dan murah.
- c. Belum terselenggaranya pemerintahan yang diorientasikan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Ternate dan umumnya masyarakat Provinsi Maluku Utara.

9. Permasalahan Pembangunan Berbasis Kepulauan yang Berkelanjutan

Kota Ternate yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara secara geografis masuk kedalam rumpun daerah kepulauan dimana wilayahnya sebagian besar berupa pulau/kepulauan yang dikelilingi oleh perairan (laut). Dengan karakteristik wilayah yang demikian, maka porsi program dan pagu anggaran untuk mempercepat pembangunan di wilayah pulau/kepulauan dalam ukuran waktu 5 (lima) tahun kedepan akan diberi porsi yang lebih besar dibandingkan pembangunan di wilayah daratan.

Berdekatan pembangunan berkelanjutan telah secara tegas di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan berdimensi kepulauan, maka pembangunan pada wilayah pulau-pulau terpencil, terbelakang dan terisolir yang relatif belum dapat tersentuh secara maksimal pada 5 (lima) tahun yang lalu, dalam pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan di dorong untuk mendapatkan porsi pembangunan berbagai infrastruktur yang memadai, sehingga pada akhir perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah, yaitu tahun 2021 telah dapat sejajar dengan wilayah lainnya di Kota Ternate. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah pulau/kepulauan terpencil/tertinggal/terbelakang perlu secara konsistensi mengedepankan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam tetap dapat terjaga kuantitas dan kualitasnya.

10. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

a. Sumber Daya Manusia

Permasalahan dibidang sumber daya manusia, antara lain (i) masih kurangnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai kebutuhan; (ii) rendahnya angka partisipasi sekolah baik pada tingkat dasar

dan menengah, utamanya pada tingkat pendidikan tinggi; (iii) rendahnya rata-rata lama sekolah; (iv) rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan; dan (v) rendahnya partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih tinggi.

Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, berkorelasi secara signifikan terhadap angka pengangguran, tumbuhnya kriminalitas, meningkatnya kemiskinan dan terjadinya ketimpangan sosial lainnya, seperti tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat (pekat), tumbuhnya para penyandang masalah sosial (pengguna narkoba, pengemis dan gelandangan).

b. Sumber Daya Alam

Dari hasil telaah dan dianalisis terhadap data dan informasi yang ada telah memberi informasi, bahwa Kota Ternate memiliki potensi keanekaragaman sumber daya perairan, hutan dan laut yang belum dikelola secara terintegrasi menjadi bagian integral dalam mewujudkan daya saing daerah Kota Ternate.

Kota Ternate sebagai daerah kepulauan dan wilayah pesisir yang panjang memiliki karakteristik yang menonjol yaitu : Tangkapan air yang terbatas dan sumber daya/cadangan air tawar yang sangat rendah, peka dan rentan terhadap tekanan (*stressor*) dari pengaruh eksternal baik alami maupun kegiatan manusia memiliki sejumlah besar jenis-jenis (*organisme*) endemik dan keanekaragaman hayati yang tipikal dan bernilai tinggi.

11. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan Daerah adalah belum terintegrasinya data dasar mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi

kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai perencanaan dan penganggaran tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, belum dapat dihitung secara akurat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk belanja daerah yang belum optimal, seperti masi besarnya proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur (belanja tidak langsung), dibandingkan dengan masyarakat (belanja langsung). Sementara itu terkait dengan akuntabilitas, agar publikasi informasi keuangan daerah oleh seluruh perangkat daerah perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan berikutnya, terkait dengan tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

12. Permasalahan Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Demikian pula penegakan hukum untuk kasus-kasus sengketa, seperti sengketa lahan, alih fungsi peruntukan lahan dan kajian-kajian produk hukum lainnya, seperti surat edaran kepala daerah, surat edaran kepala perangkat daerah dan surat kesepakatan bersama (MoU) dengan lembaga lain, seperti DPRD, perlu lebih ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

13. Permasalahan Kerjasama Antar Daerah dan Dunia Usaha

Seiring semakin transparannya pengelolaan keuangan daerah pada satu sisi. Pada sisi lain kerjasama antara daerah dalam rangka mengembangkan kemampuan daya saing daerah yang bersangkutan, sejauh ini masi belum optimal. Kerangka kerjasama antar daerah dan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, belum dapat diimplementasikan secara kongkrit, masih ditemui berbagai kendala. Dengan demikian, kesepakatan dan kesepahaman (*MoU/Memorandum of Understanding*) yang telah disepakati oleh berbagai pihak, berhenti pada tataran administratif, tidak ada implementasinya.

14. Permasalahan Sinergitas antara Lembaga Eksekutif dengan Lembaga DPRD

Implementasi kerjasama (kesepakatan) antara perangkat daerah dengan DPRD masi perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan sektor, lintas sektor maupun kewilayahan termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan, belum dapat diwujudkan secara maksimal. Demikian juga kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan, sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan berbasis kinerja dapat diwujudkan.

15. Permasalahan Keterbukaan Informasi Publik, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan

karena belum semua perangkat daerah menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara periodik, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud *monitoring* dan evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal, pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda Non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

16. Permasalahan Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah. Proporsi penempatan pegawai di suatu kecamatan dan kelurahan agar dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi unggulan yang dimiliki dan kondisi keamanan, kenyamanan dan ketentraman. Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan serta kesetaraan dan kesejahteraan perlu dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

17. Permasalahan Tanggap Darurat Bencana

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kepulauan, maka perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan longsor, serta gelombang pasang yg di prediksi dapat menimbulkan tsunami. Oleh karena itu, kegiatan penanggulangan bencana

dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya: sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dan aparaturnya yang bertugas untuk itu, serta pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana bencana yang diperlukan. Oleh karena itu, agar dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Langkah selanjutnya adalah kegiatan yang berorientasi pada mitigasi bencana, seperti: identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penataan sistem peringatan dini. Demikian pula kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi bencana, masi perlu ditingkatkan. Terkait dengan hal dimaksud, maka personil Satpol PP, Linmas dan tenaga relawan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya terkait dengan tanggap darurat bencana. Sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi informasi dan persandian juga perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

18. Permasalahan Terkait Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditegaskan, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dimaksud adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dengan tugas Bappeda yang semakin berat namun strategis dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tentu membawa konsekuensi logis, yaitu semakin strategis dan

beratnya tugas dan fungsi badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengawal untuk menjamin kualitasnya dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA, AGAMAS, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**.

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

1. **Kalimat Terwujudnya**, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparatur pemerintah Kota Ternate mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan. Bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), serta partisipasi dan dukungan/dorongan dari seluruh

pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata 'bekerja' sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintah 5 (lima) tahun mendatang, serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu membahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja di bawah kendali kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate akan tercapai secara optimal.

2. **Kalimat Berbudaya**, bahwa kebijakan pemerintahan maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat *se atoran* sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat *se atoran* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
3. **Kalimat Agamais**, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagaman dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat berrmartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.
4. **Kalimat Harmonis**, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik

perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.

5. **Kalimat Mandiri**, dalam kamus bahasa Indonesia, kata Mandiri dapat mengandung beberapa pengertian, yaitu Pertama, kata mandiri dapat dimaknai sebagai sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Kedua, kata mandiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan situasinya, tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Dengan demikian maka Mandiri dapat diartikan, bahwa seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya. Ketiga, kata mandiri dapat juga diterjemahkan sebagai kondisi psikologis dan mentalis seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika

seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. Sedangkan Makna **Keempat**, kata mandiri dapat diartikan sebagai suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi di artikan sebagai perilaku yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dorongan dari dalam, tidak karena terpengaruh oleh orang lain.

6. **Kalimat Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak kepada rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).
7. **Kalimat Berwawasan Lingkungan**, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang **seluruh** arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial

budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang hijau, asri, nyaman dan sehat melalui penataan yang memberikani ketenangan, kenyamanan dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *water front city*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

2.1.2 Misi

Secara umum, Misi dapat di rumuskan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi, juga dapat di pandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi para pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat dari setiap hasil pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Ternate sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate dalam tahun 2016-2021 ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ternate yang mandiri Adil dan Sejahtera

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan antara lain membuka keterisolasian, membuka berbagai jaringan sampai ke pelosok-pelosok daerah, mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja baru,

membangun dan mengembangkan berbagai jaringan infrastruktur, membangun sektor pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membangun berbagai fasilitas kesehatan untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat, serta mengurangi balita kurang gizi, terutama mereka yang tinggal di Kecamatan Moti, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Pulau Batang Dua. Jika tujuan-tujuan ini berhasil, maka peringkat daya tingkat Kota Ternate akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan mengundang investor untuk berinvestasi ke Kota Ternate.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, di antaranya kendala geografi, kendala transparansi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya. Oleh karena itu, agenda kerja Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan dalam upaya memecahkan berbagai kendala dimaksud. Jika kendala tersebut dapat di atasi, maka pembangunan yang dilaksanakan dimasa mendatang akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata dan adil untuk meningkatkan kesejahteraannya.

2. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Berbudaya dan Agamais

Pendekatan pembangunan daerah yang semata-mata mengejar capaian target pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai infrastruktur daerah, serta meningkatkan pendapatan

daerah saja tanpa mempertimbangkan pendekatan sosial budaya, kadang tidak dapat mencapai target utama dari pembangunan daerah itu sendiri, yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Untuk melakukan sebuah perubahan, perlu ada pembangunan diberbagai sektor. Namun pembangunan itu sendiri tidak harus menjauhkan masyarakat dari budaya yang turun temurun telah hidup dimasyarakat dan diyakini sebagai sebuah nilai sosial yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun tahun 2016-2021 disamping dilakukan melalui beberapa pendekatan dan inovasi baru, juga dalam rangka melanjutkan berbagai target yang belum dapat dicapai secara maksimal di periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Pendekatan inovasi baru dalam pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah pembangunan yang berdimensi pada upaya pelestarian budaya lokal dan kearifan lokal, serta pendekatan yang berdimensi religius yaitu pembangunan daerah yang berdimensi agamais. Pembangunan daerah melalui pendekatan agamais, hakekatnya adalah pembangunan daerah yang dilakukan tidak semata-mata dalam upaya mencapai kenikmatan dan kesejahteraan dunia semata, tetapi pembangunan yang bersendikan pada akidah agama dalam upaya pencapaian kebahagiaan akhirat kelak.

Pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan budaya dan agamais, diharapkan akan dapat merubah karakter para penyelenggara pembangunan itu sendiri untuk bekerja dengan penuh kesungguhan dan dengan kejujuran, sehingga pada akhirnya akan terbangun suatu budaya kerja yang agamais, yakni birokrasi yang dalam melaksanakan pekerjaannya :

(i) Tidak KKN; (ii) Tidak ada pelanggaran hukum; (iii) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; (iv) perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*; (v) komunikasi dengan publik berjalan baik; (iv) penggunaan anggaran efisien dan efektif; (vii) produktifitas meningkatkan kuantitas dan kualitasnya; dan (viii) hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata antar Wilayah Perkotaan

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate. Jika sampai dengan akhir periode pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu, pembangunan berbagai infrastruktur masih belum dapat memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang berdomisili di wilayah terisolir, terbelakang, tertinggal dan terpencil, sehingga berbagai potensi unggulan di setiap wilayah belum dapat dikelola secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita penduduk, maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ditingkatkan dan disebar secara merata, adil dan proporsional.

Tersebarnya infrastruktur secara merata keseluruh wilayah di Kota Ternate secara proporsional, diharapkan akan mendorong tumbuhnya berbagai

aktivitas perekonomian, perdagangan, keuangan dan jasa lainnya. Tersebarinya secara merata dan proporsional infrastruktur, di harapkan akan menunjang kualitas dan kuantitas pelayanan publik seperti: penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan mengurangi terjadinya kesenjangan sosial antar wilayah, serta antar wilayah perkotaan itu sendiri.

4. Membangun Kota Ternate sebagai Kota Pesisir dan Maritim

Kota Ternate, secara geografis kewilayahannya merupakan kota yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan yang dilakukan dalam 5 (lima) tahun ke depan fokus pada pembangunan bernuansa pesisir dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan poros maritim dunia. Kota Ternate sebagai salah satu kota maritim yang berada di ujung timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan agenda besar pembangunan poros maritim dunia.

Jika dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu di Kota Ternate belum secara maksimal mengkonsentrasikan berbagai sumber daya untuk pembangunan pesisir dan maritim, maka dimasa mendatang pembangunan terkait dengan pesisir dalam rangka membangun sinergi dengan pembangunan tol laut dan poros maritim sebagai telah ditetapkan sebagai sasaran prioritas nasional, akan lebih dioptimalkan. Dengan konsep pendekatan pembangunan tersebut, diharapkan akan memberi dampak positif terhadap percepatan pembangunan Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus memberi

dampak ganda terhadap pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota lainnya di lingkup Provinsi Maluku Utara.

5. Membangun Kota Ternate sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya Sejarah dan Bahari

Kota Ternate yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi perairan, belum secara optimal mengelola potensi unggulan perairan sebagai salah satu produk unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomis yang tinggi. Dengan karakteristik demikian, maka pengelolaan potensi unggulan perairan berbasis wisata bahari, diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah yang signifikan untuk membiayai belanja pembangunan daerah. Demikian pula potensi kekayaan dan keragaman budaya yang ada di Kota Ternate yang selama ini belum dioptimalkan pengelolaannya untuk menambah pendapatan asli daerah, perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius lagi.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan, bahwa tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus

menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Ternate dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kota Ternate terkait dengan pernyataan misi untuk kurun waktu pembangunan daerah periode tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan

Indikator :

1. Angka melek huruf
2. Angka rata-rata lama sekolah
3. Angka partisipasi kasar SD/MI
4. Angka partisipasi kasar SMP/MTS
5. Angka partisipasi murni SD/MI
6. Angka partisipasi murni SMP/MTs

7. Jumlah guru dengan kualifikasi S1/D4
8. Cakupan angka partisipasi PAUD

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan

1. Angka kematian Ibu (per 1000 KH)
2. Angka kematian Bayi (per 1000 KH)
3. Angka usia harapan hidup
4. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization*
5. *Annual Parasite Incidence (API)*

Tujuan 3 :Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran 1: Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Tingkat Kemiskinan

Sasaran 2: Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial

1. Persentase Penurunan PMKS
2. Persentase Masyarakat Miskin yang telah memperoleh jaminan sosial

Tujuan 4 :Mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

1. Cakupan Jalan Kondisi Baik
2. Cakupan Pelayanan Air Bersih
3. Cakupan Jembatan Kondisi Baik

4. Cakupan Ketersediaan Jaringan Listrik

Tujuan 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran 1 : Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate
2. Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP
3. Nilai/Peringkat LPPD
4. Prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate

Tujuan 6 : Mewujudkan Ternate sebagai kota budaya

Sasaran : Terwujudnya pelestarian budaya lokal

1. Jumlah kelompok/sanggar kesenian lokal
2. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya
3. Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate
4. Jumlah seni budaya yang dilestarikan

Tujuan 7 : Mewujudkan Ternate sebagai Kota Agamais

Sasaran : Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais

Indikator :

1. Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran

2. Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina
3. Jumlah pertemuan forum antar umat beragama
4. Juara Umum kegiatan STQ/MTQ

Tujuan 8 : Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota jasa dan perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan

Indikator :

1. Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik
2. Jumlah gudang non sistem yang tersedia
3. Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik
4. Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik

Sasaran 2 : Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan

Indikator :

1. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB
2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
4. Pertumbuhan industri

Tujuan 9 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan sektor kelautan dan perikanan

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

Indikator :

1. Jumlah produksi perikanan tangkap
2. Jumlah produksi perikanan budidaya

3. Nilai Tukar Nelayan
4. Rata-Rata Pendapatan Nelayan

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir

Indikator :

1. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove
2. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang

Tujuan 10 : Mewujudkan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, religi, dan wisata bahari

Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisata

Indikator :

1. Jumlah kunjungan wisatawan lokal
2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
3. Lama rata-rata tinggal wisatawan lokal
4. Lama rata-rata tinggal wisatawan mancanegara
5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Ternate

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate

Indikator :

1. Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan
2. Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan

Hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran

VISI: TERWUJUDNYA TERNATE MENJADI KOTA BERBUDAYA, AGAMAI, HARMONIS, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1 Membangun Ternate Yang Mandiri, Adil dan Sejahtera	1 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Angka melek huruf 2 Angka rata-rata lama sekolah 3 Angka partisipasi kasar SD/MI 4 Angka partisipasi kasar SMP/MTS 5 Angka partisipasi murni SD/MI 6 Angka partisipasi murni SMP/MTs 7 Jumlah guru SD dengan kualifikasi S1/D4 8 Cakupan angka partisipasi PAUD
	2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan	9 Angka kematian Ibu (per 1000 KH) 10 Angka kematian Bayi (per 1000 KH) 11 Angka usia harapan hidup 12 Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> 13 <i>Annual Parasite Incidence (API)</i>
	3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14 Tingkat pengangguran terbuka 15 Tingkat kemiskinan
			16 Persentase penurunan PMKS 17 Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan sosial
	4 Mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar	5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	18 Cakupan Jalan Kondisi Baik 19 Cakupan pelayanan air bersih

			20 Cakupan Jembatan Kondisi Baik 21 Cakupan ketersediaan Jaringan Listrik
	5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih	6 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate 23 Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP 24 Nilai/Peringkat LPPD 25 Prsentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK
		7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	26 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate
2 Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Berbudaya dan Agamais	6 Mewujudkan Ternate sebagai kota budaya	8 Terwujudnya pelestarian budaya lokal	27 Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya 28 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate 29 Jumlah seni budaya yang dilestarikan
	7 Mewujudkan Ternate sebagai Kota Agamais	9 Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	30 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran 31 Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina 32 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama 33 Juara umum kegiatan STQ/MTQ
3 Mewujudkan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan yang Merata antar wilayah perkotaan	8 Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota jasa dan perdagangan	10 Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan	34 Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik 35 Jumlah gudang nonsistem yang tersedia 36 Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik 37 Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik
		11 Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan	38 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 39 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

			40 Laju Inflasi 41 Pertumbuhan Industri	
4	Membangun Kota Ternate Sebagai Kota Pesisir dan Maritim	9 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan sektor kelautan dan perikanan	12 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	42 Jumlah produksi perikanan tangkap 43 Jumlah produksi perikanan budidaya 44 Nilai Tukar Nelayan 45 Rata-Rata Pendapatan Nelayan
			13 Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	47 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove 47 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
5	Membangun Kota Ternate Sebagai Pusat Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya, Sejarah dan Bahari	10 Mewujudkan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, religi, dan wisata bahari	14 Meningkatnya kunjungan wisata	48 Jumlah kunjungan wisatawan lokal 49 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
			15 Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	50 Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan 51 Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Ternate tahun 2016 tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ternate Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Meningkatkan derajat pendidikan	1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Angka partisipasi kasar SD/MI 2 Angka partisipasi kasar SMP/MTs 3 Angka partisipasi murni SD/MI 4 Angka partisipasi murni SMP/MTs 5 Cakupan angka partisipasi PAUD
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kesehatan	6 Angka kematian Ibu (per 1000 KH) 7 Angka kematian Bayi (per 1000 KH) 8 Angka usia harapan hidup
3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3 Meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	9 Tingkat pengangguran terbuka 10 Tingkat kemiskinan
	4 Meningkatkan jaminan dan perlindungan social	11 Persentase penurunan PMKS 12 Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan sosial kesehatan
4 Mewujudkan pemerataan infrastruktur dasar	5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	13 Cakupan Jalan Kondisi Baik 14 Cakupan pelayanan air bersih 15 Cakupan Jembatan Kondisi Baik
5 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih	6 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	16 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate 17 Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP
	7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	18 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate
6 Mewujudkan Ternate sebagai Kota budaya	8 Terwujudnya pelestarian budaya lokal	19 Jumlah seni budaya yang dilestarikan

7	Mewujudkan Ternate sebagai Kota Agamais	9	Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	20	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	21	Juara umum kegiatan STQ/MTQ
8	Mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Jasa dan Perdagangan	10	Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan	22	Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	23	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik
		11	Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan	24	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	25	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
9	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan sektor kelautan dan perikanan	12	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	27	Jumlah produksi perikanan tangkap	28	Jumlah produksi perikanan budidaya
		13	Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	29	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove	30	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
10	Mewujudkan Kota Ternate sebagai destinasi wisata budaya, religi dan wisata bahari	14	Meningkatnya kunjungan wisata	31	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	32	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
		15	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	33	Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan		

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Angka melek huruf	96.96 %
	2 Angka rata-rata lama sekolah	9 Tahun
	3 Angka partisipasi kasar SD/MI	95.43 %
	4 Angka partisipasi kasar SMP/MTS	78.66 %
	5 Angka partisipasi murni SD/MI	82.22 %
	6 Angka partisipasi murni SMP/MTs	76.51 %
	7 Jumlah guru SD dengan kualifikasi S1/D4	1,160 Guru
	8 Cakupan angka partisipasi PAUD	85 %
2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kesehatan	9 Angka kematian Ibu (per 1000 KH)	1 %
	10 Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	5.5 %
	11 Angka usia harapan hidup	70.37 Tahun
	12 Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i>	88 %
	13 <i>Annual Parasite Incidence (API)</i>	1 %
3 Meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14 Tingkat pengangguran terbuka	6.33 %
	15 Tingkat kemiskinan	2.8 %
4 Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial	16 Persentase penurunan PMKS	100 %
	17 Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan sosial	
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	18 Cakupan Jalan Kondisi Baik	24.06 KM
	19 Cakupan pelayanan air bersih	80 %
	20 Cakupan Jembatan Kondisi Baik	1.58 KM
	21 Cakupan ketersediaan Jaringan Listrik	97.4 %
6 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate	WTP Opini
	23 Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP	CC Nilai
	24 Nilai/Peringkat LPPD	3

	25	Prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	50	%	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public	26	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate	78	Nilai
8	Terwujudnya pelestarian budaya lokal	27	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya	2	Kali
		28	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	90	%
		29	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	6	Jenis
9	Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	30	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100	%
		31	Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina	150	TPQ
		32	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4	Kali
		33	Juara umum kegiatan STQ/MTQ	1	Juara
10	Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan	34	Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	70	%
		35	Jumlah gudang nonsistem yang tersedia	10	Buah
		36	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik	42.86	%
		37	Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik	66.67	%
11	Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan	38	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24	%
		39	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3.5	%
		40	Laju Inflasi	1.91	%
		41	Pertumbuhan Industri	30	%
12	Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	42	Jumlah produksi perikanan tangkap	30,000	%
		43	Jumlah produksi perikanan budidaya	35,200	Ton
		44	Nilai Tukar Nelayan	105	NTN
		45	Rata-Rata Pendapatan Nelayan	2,500,000	Rp
13	Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	46	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove	1.5	%
		47	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang	1.7	%

14	Meningkatnya kunjungan wisata	48	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	270,000	Orang
		49	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	4,800	Orang
15	Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	50	Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	35	Tempat
		51	Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan	1.45	%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

3.1.1 Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Katagori Nilai Capaian

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3.	55% s/d kurang dari 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama pemerintah Kota Ternate ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun mengikuti periode RPJMD. Setiap tahun IKU tersebut di implementasikan pada Perjanjian Kinerja Walikota Ternate. Pentargetan IKU dijabarkan pada Perjanjian Kinerja Walikota Ternate setiap tahun.

Hasil pengukuran Indikator Kineja Utama (IKU) Pemerintahan Kota Ternate di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.2

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

Jumlah Indikator Kinerja Utama	Katagori	Jumlah Capaian	Persentase
33 Indikator Kinerja Utama	Baik Sekali	16	48,49
	Baik	17	51,52
	Cukup	-	-
	Kurang	-	-
Jumlah			100,00

Dari tabel tersebut diketahui bahwa dari 33 indikator kinerja utama (IKU) sebanyak 16 atau 48,49% mencapai hasil dengan katagori Baik Sekali dan 17 atau 51,52% mencapai hasil Baik. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

3.1.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dengan realisasinya. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidak-berhasilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan strategi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Ternate kedepan.

Hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berkisar antara 70,95% sampai dengan 150,00% yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Katagori Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No	Capaian Kinerja Indikator Sasaran		Predikat	Jumlah
1	Lebih dari 100%		Baik Sekali (BS)	23
2	Lebih dari 75 s/d 100%		Baik (B)	27
3	55 s/d kurang dari 75%		Cukup (C)	1
4	Kurang dari 55%		Kurang (K)	-
			Jumlah	51

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran tersebut di atas berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Pemerintah Kota Ternate sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ternate tahun 2016-2021.

Dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tersebut terdapat 5 (lima) Misi 10 (sepuluh) Tujuan dan 15 (lima belas) Sasaran, dengan 51 (lima puluh satu) indikator Sasaran, perinciannya sebagai berikut:

- Misi 1 terdapat 5 (lima) Tujuan, 7 (tujuh) Sasaran, 26 (dua puluh enam) indikator Sasaran.
- Misi 2 (dua) terdapat 2 (dua) Tujuan, 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran.
- Misi 3 (tiga) terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran, 8 (delapan) Indikator Sasaran.
- Misi 4 (empat) terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 6 (enam) Indikator Sasaran.

- Misi 5 (lima) terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran pada Formulir Pengukuran Kinerja (terlampir), diketahui capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2017

MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
Misi 1	5	7	26	BS= 11 , B = 13, C=1 , K=-
Misi 2	2	2	7	BS= 1, B = 6, C= -, K= -
Misi 3	1	2	8	BS=4 , B= 4, C= -, K= -
Misi 4	1	2	6	BS= 5, B = 1, C= - , K= -
Misi 5	1	2	4	BS= 2 , B = 2, C= -, K= -

Hasil pengukuran 15 (lima belas) Sasaran, dengan 51 (lima puluh satu) Indikator Sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017, diketahui persentase capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Kategori Pencapaian Indikator sasaran
Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

MISI	KATAGORI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE
MISI 1 (26 Indikator Sasaran)	Baik Sekali	11	42,31
	Baik	14	53,85

	Cukup	1	3,85
	Kurang	-	-
Jumlah			100,00
MISI 2 (7 Indikator sasaran)	Baik Sekali	1	14,29
	Baik	6	85,72
	Cukup	-	-
	Kurang	-	-
Jumlah			100,00
MISI 3 (8 Indikator sasaran)	Baik Sekali	4	50,00
	Baik	4	50,00
	Cukup	-	-
	Kurang	-	-
Jumlah			100,00
MISI 4 (6 Indikator sasaran)	Baik Sekali	5	83,34
	Baik	1	16,67
	Cukup	-	-
	Kurang	-	-
Jumlah			100,00
MISI 5 (4 Indikator sasaran)	Baik Sekali	2	50,00
	Baik	2	50,00
	Cukup	-	-

	Kurang	-	-
Jumlah			100,00

Analisis tabel tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- Indikator Sasaran yang katagori Baik Sekali sebanyak 23 indikator sasaran atau 45,10%
- Indikator Sasaran yang katagori Baik sebanyak 27 indikator sasaran atau 52,95%
- Indikator Sasaran yang katagori Cukup sebanyak 1 indikator sasaran atau 1,96%
- Indikator Sasaran yang katagori Kurangi sebanyak 0 indikator sasaran atau 0%

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut **sebesar 103,41%** atau berada pada katagori **Baik Sekali**, ini bermakna capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 **Baik Sekali**

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dan aksebilitas pendidikan

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Melek Huruf	%	100	100	100,00	96.96	97,75	100,81

2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9	9	100,00	9	9	100,00
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	99.21	95.43	96.19	95,43	96,08	100,68
4	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	75,00	87,66	116.88	78,66	77,89	99,02
5	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	92.00	82.22	89.37	82,22	83,37	101,40
6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	75.00	78.36	104.48	76,51	75,32	98,44
7	Jumlah Guru SD dengan kualitas S1/D4	Guru	-	-	-	1160	823	70,95
8	Cakupan angka Partisipasi PAUD	%	-	-	-	97,41	98.70	101.33
Jumlah Rata-Rata Capaian					84.49			98,43

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa 1 (satu) Indikator kinerja sasaran mencapai target, yaitu angka rata-rata lama sekolah. Tercapainya target indikator tersebut karena tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai, keterjangkauan jarak sekolah dengan pemukiman, ketersediaan jumlah guru dengan siswa yang sudah memadai, kepedulian masyarakat dalam mendorong dan mengawasi anak untuk belajar yang semakin membaik, adanya bantuan berbagai beasiswa dari Pemerintah Pusat serta lembaga peduli pendidikan lainnya bagi siswa-siswi yang tidak mampu secara ekonomi, serta adanya kebijakan Pemerintah Kota Ternate melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sehingga kebutuhan pendanaan pendidikan tidak dibebankan lagi kepada masyarakat (sekolah gratis).

Dari tabel di atas terlihat 4 (empat) indikator sasaran yang capaiannya melampaui target yaitu: 1) Angka Melek Huruf, 2) Angka partisipasi Kasar SD/MI, 3) Angka Partisipasi murni SD/MI, 4) Cakupan angka Partisipasi PAUD. Tingginya capaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Melek huruf nilai capainnya tinggi karena tingkat kesadaran masyarakat untuk belajar/bersekolah di kota Ternate sudah sangat tinggi dan juga ketersediaan sekolah sampai pada pelosok pedalam, sehingga keterjangkauan sekolah dengan tempat pemukiman sudah sangat dekat.
2. Angka partisipasi kasar SD/MI nilai capaiannya tinggi karena tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai, keterjangkauan jarak sekolah dengan pemukiman, adanya bantuan berbagai beasiswa dari Pemerintah Pusat serta lembaga perduli pendidikan lainnya bagi siswa-siswi yang tidak mampu secara ekonomi, serta adanya kebijakan Pemerintah Kota Ternate melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sehingga kebutuhan pendanaan pendidikan tidak dibebankan lagi kepada masyarakat (sekolah gratis) serta tingginya kesadaran orang tua siswa untuk menyekolahkan anak.
3. Angka Partisipasi Murni SD/MI nilai capaiannya melampaui target karena adanya mutasi masuk orang tua yang bekerja pada instansi vertikal dan BUMN serta bekerja pada Perusahaan Swasta di Ternate yang mempunyai anak usia sekolah, juga adanya perpindahan orang tua karena mencari nafkah di Ternate namun belum terdata sebagai penduduk Kota Ternate.
4. Cakupan Angka Partisipasi PAUD nilai capaiannya melampau target karena sesuai target dari 77 Kelurahan yang ada di Kota Ternate, sebanyak 75 Kelurahan pada Tahun 2017 mempunyai PAUD, namun realisasinya sebanyak 76 Kelurahan telah memiliki PAUD atau terjadi penambahan 1 Kelurahan yang memiliki PAUD. Bertambahnya PAUD tersebut karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada PAUD yang jangkauannya tidak terlalu jauh dari

tempat tinggal dan juga adanya kemudahan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate dalam mendirikan PAUD.

Namun demikian, terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu:

1. Angka Partisipasi kasar SMP/MTs, nilai capaiannya 99,02%. Tidak tercapaiannya target tersebut karena Kota Ternate merupakan Kota jasa dan perdagangan dimana tingkat mobilitas penduduk sangat tinggi sehingga terjadi mutasi siswa keluar daerah mengikuti orang tua dan juga adanya sejumlah orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke luar daerah dengan memilih sekolah tertentu yang tidak ada di Ternate.

Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kedepan akan terus dilakukan peningkatan mutu guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga terjadi peningkatan kualitas sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Ternate dan memberikan kemudahan dalam pembukaan sekolah unggulan tertentu yang belum ada di Ternate.

2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, nilai capaiannya 98,445%. Tidak tercapaiannya target tersebut karena adanya sejumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan studi keluar daerah pada sekolah tertentu yang tidak ada di Kota Ternate dan sekolah yang dianggap lebih berkualitas serta adanya sejumlah siswa lulusan SD yang mengikuti orang tua pindah tempat kerja keluar daerah.

Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kedepan akan terus dilakukan peningkatan mutu guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga terjadi peningkatan kualitas sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Ternate dan memberikan kemudahan dalam pembukaan sekolah unggulan tertentu yang belum ada di Ternate.

3. Jumlah guru SD dengan kualitas S1/D4, nilai capaian 70,95 disebabkan: masih rendahnya motivasi sebagian guru untuk meningkatkan pendidikan akademik S1/D4 terutama guru yang sudah mendekati masa pensiun dan sebagian guru masih dalam proses penyelesaian studi sambil melaksanakan tugas mengajar;

Solusi:

Untuk meningkatkan nilai capaian kedepan adalah melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan pemberian bantuan beasiswa bagi guru yang akan melanjutkan studi dan memberikan dorongan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan S1/D4 agar mereka bisa memperoleh tunjangan sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan pemberian tunjangan sertifikasi.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan

Pencapaian target sasaran 2 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka kematian Ibu (per 1000 KH)	%	0.14	0.13	112.86	1	1	100
2	Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	%	7	5.8	117.14	5,5	4,1	125.45
3	Angka usia harapan hidup	Tahun	71	71	98.59	70,37	70.37	100
4	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization	%	-	-	-	88	93	105,68
5	Annual Parasite	%	-	-	-	1	0,8	125

	Incidence (API)							
Jumlah Rata-Rata Capaian					109.53			110,23

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 (dua) indikator sasaran mencapai target yaitu: angka kematian ibu (100.000 KH) dan angka usia harapan hidup. Tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka kematian Ibu Per 100.000 KH, tercapainya target tersebut karena adanya upaya yang dilakukan, meliputi:
 - a. Peningkatan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan.
 - b. Deteksi dini oleh bidan bersama kader posyandu dengan melakukan pelacakan kasus ibu hamil dengan faktor resiko maupun tanda bahaya pada ibu hamil dan segera dilakukan penanganan dengan instrument yang dipakai kartu pujirochiati.
 - c. Penyediaan rumah tunggu kelahiran bagi daerah terpencil yaitu moti, hiri dan batang dua, ibu hamil yang mengalami komplikasi didatangkan lebih awal sebelum jadwal persalinan di rumah tunggu (kurang lebih 1 minggu sebelum persalinan) sehingga kasus komplikasi dapat ditangani oleh dr spesialis.
 - d. Pembentukan kelas ibu hamil di setiap kelurahan sebagai upaya menjangirg ibu hamil dengan penyampaian materi tentang kesehatan pada ibu hamil.
 - e. Pelayanan Ante natal atau pemeriksaan ibu hamil secara standar pada saat pemeriksaan ibu hamil baik di Puskesmas maupun Puskesmaskel.
2. Angka harapan hidup, tercapainya target tersebut karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan di Kota Ternate sangat tinggi hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang relatif baik, adanya penyuluhan kesehatan yang dilakukan secara kontinyu oleh tenaga medis Pemerintah Kota Ternate dan oleh lembaga

masyarakat pemerhati kesehatan, telah memadainya sumber daya tenaga medis serta sarana prasarana kesehatan yang sudah sangat memadai di Kota Ternate.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang nilai capaiannya melampaui target yaitu:

1. Angka kematian bayi (per 1000 KH) nilai capaian 125.45%. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan meliputi: pemberian makanan tambahan (PMT) pada Bumil KEK, melakukan kunjungan rumah untuk melakukan kunjungan Neonatal, melakukan penyuluhan berbasis masyarakat (TOMA, TOGA), melakukan penyuluhan tanda bahaya pada bayi; dan melakukan manajemen terpadu pada bayi muda untuk skrining bayi dengan faktor resiko.
2. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization, nilai capaian 105,68. Tingginya nilai capaian tersebut karena sebagian besar wilayah Kota Ternate mudah dijangkau sehingga pelaksanaan imunisasi dapat dengan mudah dilaksanakan, selain itu Rumah Sakit yang ada di Kota Ternate dan Klinik Bersalin juga melakukan imunisasi serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi di Kota Ternate sudah cukup tinggi.
3. *Annual Parasite Incidence* (API) nilai capaian 125 %.Tingginya nilai caaian tersebut karena adanya: optimalnya koordinasi LS terkait dalam pengendalian dan penanggulangan Malaria, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari kontak nyamuk melalui penyuluhan, meningkatnya kesadaran penggunaan kelambu; dan meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan pemantauan wilayah setempat.

Sasaran 3: Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	-	-	-	6.33	7.71	78.20
2	Tingkat kemiskinan	%	2,70	2,67	98,89	2.8	2.73	102,50
Jumlah Rata-Rata Capaian					98,89			90,35

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu tingkat kemiskinan nilai capaiannya melampaui target (102,50%). Tingginya nilai capaian tersebut karena semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate Tahun 2017 yang tumbuh 8,07 % hal tersebut berdampak meningkatnya pendapatan masyarakat. Hasil survei Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa sebanyak 6.040 jiwa penduduk Kota Ternate masuk katagori miskin yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Rp.514.396) Kota Ternate menduduki peringkat keenam terendah secara nasional. Kota Ternate merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Indonesia Timur yang masuk peringkat dengan tingkat kemiskinan rendah secara nasional. Enam Kabupaten/Kota tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut: 1) Kota Tangerang Selatan, 2) Kabupaten Sawah Lunto, 3) Kabupaten Badung, 4) Kota Denpasar, 5) Kota Depok, 6) Kota Ternate.

Dari tabel tersebut terlihat 1 (satu) indikator sasaran, yaitu tingkat pengangguran terbuka nilai capaiannya di bawah target yaitu 78,20%. Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 TPT Kota Ternate sebesar 7,71%. angka ini memiliki makna bahwa dari 100 penduduk angka kerja, terdapat 7,71 penduduk atau sekitar

7-8 penduduk yang menganggur. Rendahnya capaian tersebut karena pada tahun 2017 pertumbuhan perusahaan industri, jasa dan perdagangan di kota Ternate belum dapat menampung/menyerap tenaga kerja baru dan juga perusahaan yang ada banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar Kota Ternate.

Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kedepan akan diberikan kemudahan penerbitan ijin usaha dan menciptakan kondisi yang kondusif baik dari segi sosial, politik dan keamanan. Juga dilakukan pendekatan ke pelaku usaha untuk memprioritaskan menerima tenaga kerja yang mempunyai KTP Kota Ternate.

Sasaran 4: Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase PMKS yang tertangani	%	-	-	-	3.40	3.46	101,76
2	Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan kesehatan	%	-	-	-	100	100	100
Jumlah Rata-Rata Capaian								100.88

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yaitu persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan sosial realisasinya mencapai target. Tercapainya target tersebut karena pada tahun 2017 jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Ternate sesuai Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 01/II:/KT/2017 tanggal 3 Januari Tahun 2017 sebanyak 12.545 jiwa, yang tertangani melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 6.000 jiwa, dan ditangani oleh Pemerintah Kota Ternate (sistem non integrasi) sebanyak 6.539 jiwa. Dengan demikian secara keseluruhan (12.539 jiwa) masyarakat miskin di Kota Ternate terlayani jaminan kesehatan dasar.

Pada tabel tersebut di atas terlihat 1 indikator sasaran yaitu persentase PMKS yang tertangani nilai capaian 101,76. Terlampauinya capaian target tersebut karena dari total jumlah PMKS sebanyak 9.347 orang ditargetkan untuk tertangani sebanyak 3.40% (318 orang) namun realisasi sebanyak 3,46% (323 orang). Tingginya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2017 dilakukan penanganan PMK yang dananya bersumber dari APBN sejumlah 133 orang dan APBD sebanyak 190, total tertangani sebanyak 323 orang.

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan Jalan Kondisi Baik	Km	24,20	22.20	91,74	24.06	26,56	110,39
2	Cakupan ketersediaan air bersih	%	78,00	78,00	100,00	80,001	78,81	98.51
3	Cakupan Jembatan Kondisi Baik	Km	-	-	-	1.58	1,58	100,00
4	Cakupan ketersediaan Jaringan Listrik	%	75	75	100,00	97.4	97.4	100,00
Jumlah Rata-Rata Capaian					97,25			102.23

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu cakupan jembatan dalam kondisi baik dan cakupan ketersediaan jaringan listrik mencapai target. Tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan jembatan dalam kondisi baik, tercapainya target tersebut karena pada tahun 2017 terjadi perbaikan dan pembangunan jembatan melalui program pembangunan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga terjadi peningkatan kualitas jembatan dimana pada tahun 2017 terjadi tambahan jembatan sebanyak 20 unit jembatan.
2. Cakupan ketersediaan jaringan listrik, tercapainya target tersebut karena terjadi penambahan jaringan listrik melalui program pengembangan dan penataan utilitas kota dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan lampu dan jaringan, pengadaan material listrik PJU dan pengadaan tiang listrik. Sampai akhir tahun 2017 sebanyak 75 atau 97.4% kelurahan di Kota Ternate telah terpasang jaringan listrik dari total 77 kelurahan yang ada.

Pada tabel tersebut juga terlihat 1 (satu) indikator sasaran capaiannya melampaui target yaitu cakupan jalan kondisi baik nilai capaian 110,39% Tingginya nilai capaian karena pada tahun 2017 dilakukan perbaikan dan pembangunan jalan melalui program pembagunan jaringan jalan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dimana realisasinya melebihi target yang ditetapkan karena adanya pendanaan yang cukup tersedia sehingga terjadi peningkatan kualitas jalan

Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu cakupan ketersediaan air bersih dengan nilai capaian 98,51. Tidak tercapainya target tersebut karena kurang tersedianya sumur sumber air di Kota Ternate untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat.

Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, kedepan akan dilakukan pembangunan sumur baru untuk memenuhi kebutuhan air dan memperluas jaringan perpipaan untuk menjangkau kewilayah pemukiman baru.

Sasaran 6: Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100
2	Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP	Nilai	-	-	-	CC	CC	100
3	Nilai/Peringkat LPPD	Nilai	-	-	-	3	3,08	102.67
4	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	%	45,00	39.63	88.07	50	40.21	80.41
Jumlah Rata-Rata Capaian					94,04			95,77

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 2 (dua) indikator sasaran mencapai target, yaitu: opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate dan nilai/predikat hasil evaluasi SAKIP. Tercapainya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate nilai capaian 100%. Dari hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate tahun 2017 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), Tercapainya target tersebut karena adanya komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelola keuangan daerah untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan dalam laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan telah efektifnya sistem pengendalian intern.
2. Nilai/predikat hasil evaluasi SAKIP nilai capaian 100%. Evaluasi terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Kota Ternate dilakukan langsung oleh Tim Evaluator Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan hasil/nilai CC. Tercapainya target tersebut karena adanya komitmen dari Walikota Ternate yang didukung oleh pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Ternate untuk memperbaiki implementasi SAKIP Pemerintah Kota Ternate.

Pada tabel tersebut di atas terlihat 1 (satu) indikator sasaran yaitu nilai/peringkat LPPD melampaui target dengan nilai capaian 102,67. Target indikator nilai/predikat LPPD Kota Ternate Tahun 2017 adalah 3 dengan realisasi 3.08. Terlampauinya target tersebut karena adanya komitmen dari pimpinan perangkat daerah Kota Ternate untuk memperbaiki IKK dan juga adanya perkembangan perbaikan capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2017

Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK nilai capaian 80.41%. tidak tercapainya target tersebut karena masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab obyek pemeriksaan, baik pimpinan SKPD maupun pihak ketiga (rekanan) dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan temuan sebagian sudah tidak jelas keberadaannya.

Solusi

Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, adalah memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang lamban dalam menyelesaikan temuan dan memberikan sanksi tidak mengikutsertakan rekanan yang tidak menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP dan juga hasil pemeriksaan BPK pada pengadaan barang/jasa pada masa yang akan datang. Selain itu mengefektifkan peran Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pemerintah Kota Ternate dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate	Nilai	-	-	-	78.00	78.09	112,00
Jumlah Rata-rata Capaian								112.00

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa indikator sasaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate nilai capaian 112,00%. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Ternate tahun 2017 nilai capaian 78,09 atau katagori B. Tercapainya target tersebut karena adanya komitmen Walikota Ternate untuk memperbaiki pelayanan publik di Kota Ternate dengan memperbaiki

sarana dan prasarana penunjang pelayanan, memperbaiki mentalitas petugas layanan dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Sasaran 8: Terwujudnya pelestarian budaya lokal

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 8 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya	Kali	-	-	-	2	2	100,00
2	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	%	100,00	88,99	88,99	90	88,99	98,88
3	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Jenis	-	-	-	6	6	100,00
Jumlah Rata-Rata Capaian								99.63

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai target yang ditetapkan, yaitu jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni budaya dan jumlah seni budaya yang dilestarikan. Tercapinya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni budaya mencapai target karena pada tahun 2017 dilaksanakan even seni budaya pada Hari Ulang Tahun Kota Ternate dan pada festival Legu Gam.

2. Jumlah seni budaya yang dilestarikan mencapai target karena dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 6 jenis, yaitu: 1) Ela-ela, 2) Kora-Kora, 3) Dabus, 4) Baramasuwen, 5) Sastra Ternate, dan 6) Seni Tari Ternate secara keseluruhan dilakukan pembinaan pada tahun 2017.

Namun demikian terdapat 1 indikator yang capaiannya dibawah target yaitu persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan Bahasa Daerah Ternate dengan nilai capaian 98,88%. Jumlah sekolah dasar di Kota Ternate tahun 2017 sebanyak 109, sekolah yang mengajarkan Bahasa Daerah Ternate sebanyak 97. Tidak tercapainya target tersebut karena pada tahun 2017 adanya sejumlah guru Bahasa Daerah Ternate tidak aktif mengajar disebabkan mengikuti suami yang bekerja diluar Kota Ternate dan adanya guru honor yang telah terangkat menjadi PNS pada daerah lain.

Solusi:

Akan dilakukan seleksi guru Bahasa Daerah Ternate untuk mengisi kekosongan Guru Bahasa Daerah Ternate di sejumlah sekolah.

Sasaran 9: Terwujudnya masyarakat Kota ternate yang agamais

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 9 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina	TPQ	100	183	183,00	150	200	133.33
3	Jumlah pertemuan forum antar	Kali	2	2	100,00	4	4	100,00

	umat beragama							
4	Juara umum kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi	Juara	-	-	-	1	1	100,00
Jumlah Rata-Rata Capaian					127,67			106,67

Pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran mencapai target. Tercapaiannya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran mencapai target karena optimalnya kordinasi lintas sektoral, adanya upaya yang optimal dari pihak kepala sekolah dan guru agama Islam dalam melakukan pembinaan terhadap siswa dalam kegiatan baca tulis Al-Quran, juga adanya dorongan dan pembinaan dari pihak orang tua siswa yang melakukan pembinaan langsung terhadap anaknya maupun yang memasukan anaknya ke TPQ.
2. Jumlah pertemuan forum antar umat beragama mencapai target karena telah tumbuhnya kesadaran dan komitmen dari tokoh-tokoh agama untuk melakukan pertemuan secara periodik setiap triwulan sekali.
3. Juara umum kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi Maluku Utara. Tercapainya target karena adanya upaya persiapan maksimal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui seleksi tingkat Kota Ternate serta pembinaan yang kontinyu dan reward kepada para juara.

Juga terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang capaiannya melampaui target, yaitu jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina nilai capain 133.33%.Tingginya nilai capaian tersebut karena terjadi efisiensi anggaran pembinaan, sesuai rencana dilakukan pembinaan terhadap 150 TPQ, namun dilakukan pembinaan terhadap 200 TPQ

Sasaran 10: Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 10 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	%	-	--	-	70	70	100,00
2	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik	Unit	-	-	-	10	15	150,00
3	Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik	%	-	-	-	42,86	42,86	100,00
4	Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik	%	-	-	-	66,67	66,67	100,00
Jumlah Rata-Rata Capaian								112.50

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran, sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran mencapai target, yaitu: persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik, jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik dan persentase pelabuhan rakyat dalam kondisi baik. Tercapaiannya Target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Pasar Rakyat dalam kondisi baik mencapai target karena sesuai target tahun 2017 dilakukan pembangunan dan rehabilitasi pasar sebanyak 7 Unit dari total

Pasar rakyat yang ada di Kota Ternate sebanyak 10 Unit, dan terealisasi sebanyak 7 unit.

2. Persentase pelabuhan rakyat dalam kondisi baik mencapai target karena sesuai target tahun 2017 jumlah pelabuhan rakyat dalam kondisi baik sebanyak 6 atau 42,86% dari total pelabuhan rakyat yang ada di Kota Ternate yaitu sebanyak 14 pelabuhan. Realisasi tahun 2017 sebanyak 6 pelabuhan rakyat dalam kondisi baik atau sebesar 42,86 % dari jumlah pelabuhan rakyat yang ada di Kota Ternate.
3. Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik mencapai target karena dari total 3 Unit terminal Angkutan Darat di Kota Ternate, pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2 terminal dalam kondisi baik, realisasi tahun 2017 sebanyak 2 terminal. Tercapainya target tersebut karena pada tahun 2017 dilakukan perbaikan terhadap 1 unit terminal angkutan darat.

Pada tabel tersebut di atas diketahui 1 (satu) indikator sasaran yaitu Jumlah Gudang Non Sistem yang nilai capaiannya 150%. Tingginya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2017 terealisasi jumlah gudang non sistem sebanyak 15 unit dari target sebanyak 10 unit.

Sasaran 11: Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 11 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap	%	-	-	-	24	24,94	103,92

	PDRB							
2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	-	-	-	3,5	3,52	100,57
3	Pertumbuhan industri	%	-	-	-	30	34,52	115,07
Jumlah Rata-rata Capaian								104.10

Pada tabel tersebut diatas, terlihat 3 (tiga) indikator sasaran nilai capaiannya melampaui target yaitu: kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Tingginya nilai capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB nilai capaian 103,92. Target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Ternate tahun 2017 sebesar 24%, realisasinya sebesar 24,94%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan pada tahun 2017 geliat perdagangan di Kota Ternate meningkat karena iklim sosial, politik dan keamanan yang kondusif, meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Sektor perdagangan tersebut mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Ternate.
2. Indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB nilai capaian 100,58%. Target kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2017 3,5%, realisasinya 3,52%. Tingginya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2017 pertumbuhan sektor industri mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB Kota Ternate.

3. Pertumbuhan industri nilai capaian 115,07%. Target pertumbuhan Industri Kota Ternate tahun 2017 sebesar 30%, realisasinya 34,52%. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya pertumbuhan industri yang signifikan pada tahun 2017. Jumlah industri pada tahun 2016 sebanyak 901 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.176 industri. Tingginya pertumbuhan industri tersebut karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Ternate dalam pemberian ijin usaha dan adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak perbankan dalam memperoleh pinjaman terhadap kegiatan UKM.

Sasaran 12: Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

Pencapaian target sasaran 12 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 12 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	-	-	-	30.000	30.360	105.43
2	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	-	-	-	35.200	32.993	93,58
3	Nilai Tukar Nelayan	%	-	-	-	105	117	111.43
4	Rata-rata pendapatan Nelayan	%	-	-	-	2.500.000	2.700.000	108,00
Jumlah Rata-Rata Capaian								104.61

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran semuanya mencapai hasil optimal melampaui target. Tingginya nilai capaiannya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, nilai capaian 101,45%. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya penambahan sarana prasarana perikanan tangkap sehingga produksi perikanan meningkat. Pada tahun 2017 target produksi perikanan tangkap sebesar 30.000 Ton realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 31.630 .
2. Nilai Tukar Nelayan, nilai capaian 11,43, Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan terjadi peningkatan produksi perikanan sehingga mempengaruhi NTN.
3. Rata-rata pendapatan nelayan nilai capaian 108,00. Tingginya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2017 produksi perikanan meningkat dan juga harga hasil perikanan membaik sehingga pendapatan nelayan meningkat.

Namun demikian, terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target yaitu persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, nilai capaian 93,58%. Target tahun 2017 sebesar 35.200 Ton namun realisasi tahun 2017 hanya 32.939 Ton. Kondisi ini terjadi disebabkan berkurangnya minat dari pada petani ikan untuk budidaya ikan (khusus ikan air tawar) karena di Kota Ternate untuk konsumsi ikan masih mengandalkan ikan dari laut.

Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan ini kedepan, maka akan diberikan bantuan kepada petani budidaya ikan air tawar berupa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, bantuan sarana tambak, dan bantuan benih ikan

Sasaran 13: Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir

Pencapaian target sasaran 13 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 13 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	%	-	-	-	1.5	1	133.33
2	Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang	%	-	-	-	1,7	1.5	111.76
Jumlah Rata-rata Capaian								122.55

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai hasil optimal dengan melampaui target yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase penurunan tingkat kerusakan Ekosistem Mangrove nilai capaian 133,3%. Tingginya nilai capaian tersebut karena Pada tahun 2017 dilakukan penanaman kembali sebanyak 17.500 anakan Mangrove dan terbentuknya kelompok PSDA pengelola sumberdaya pesisir di 18 Kelurahan di Kota Ternate melalui program CCDP_IFAD.
2. Indikator persentase penurunan tingkat kerusakan Ekosistem Terumbu Karang dengan nilai capaian 111.76. Tingginya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2017 di lakukan rehabilitasi terumbu karang dan terbentuknya kelompok PSDA pengelola sumberdaya pesisir di 18 Kelurahan di Kota Ternate melalui Program CCDP_IFAD.

Sasaran 14: Meningkatnya kunjungan wisata

Pencapaian target sasaran 14 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 14 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	Orang	-	-	-	270.000	278.200	103,04
2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	-	-	-	4.800	4.870.	101,46
Jumlah Rata-rata Capaian								102.25

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran nilai capaian melampaui target. Terlampaui capaian target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah kunjungan wisatawan lokal nilai capaian 103,04%. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya even lomba mancing Internasional di Kepulauan Widi Kabupaten Halmahera Selatan, di mana Kota Ternate menjadi pintu gerbang dan tempat transit menuju lokasi lomba mancing tersebut, serta adanya even Legu Gam yang merupakan even tahunan Nasional. Juga adanya kegiatan promosi melalui: *E. promption*, promosi melalui media cetak dan kerjasama dengan berbagai lembaga promosi.
2. Jumlah kunjungan wisatawan manca negara nilai capaian 101,46% Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya even lomba mancing Internasional di Kepulauan Widi Kabupaten Halmahera Selatan, di mana Kota Ternate menjadi pintu gerbang dan tempat

transit menuju lokasi lomba mancing tersebut, serta adanya even Legu Gam yang merupakan even tahunan Nasional. Juga adanya kegiatan promosi melalui: *E. promotion*, promosi melalui media cetak, dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga promosi.

Sasaran 15: Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate

Pencapaian target sasaran 15 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 15 Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016 (%)	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan	%	-	-	-	35	35	100,00
2	Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan	%	-	-	-	1.45	1.45	100.00
Jumlah Rata-Rata Capaian								100,00

Pada tabel tersebut diketahui 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai target yaitu jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan dan persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan. Tercapaiannya target tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan nilai capaian sesuai 100% karena dari total jumlah obyek wisata di Kota Ternate yaitu sebanyak 35 obyek, secara

keseluruhan di perbaiki dan atau dipelihara pada tahun 2017 melalui program pengembangan destinasi wisata dan program rehabilitasi/pemeliharaan obyek wisata.

2. Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan nilai capaian 107,69%. Tercapainya target tersebut karena adanya upaya pemberian kemudahan dalam pemberian ijin pembangunan hotel dan penginapan. Jumlah hotel dan penginapan di Kota Ternate Tahun 2016 sebanyak 69 unit pada tahun 2017 tumbuh menjadi 70 unit, berarti terjadi penambahan 1 unit.

3.3. TREND CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate 2017 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena pada RPJMD Kota Ternate Tahun 2016-2021 pentargetan kinerja mulai tahun 2017, sedangkan tahun 2016 adalah masa transisi. Juga disebabkan terjadi perubahan mendasar terhadap Sasaran dan Indikator Sasaran pada perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Pada indikator sasaran terjadi perubahan yang signifikan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap SAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun-tahun sebelumnya,

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017, bahwa Anggaran Pendapatan sebesar Rp 991.364.444.519,00 sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.031.362.818.519,00. Arah Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017, yaitu belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan
- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain : kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3.4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Ternate 2016-2021 pendapatan daerah sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing

sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang memperhatikan, antara lain :

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan, sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin Pemerintah Kota Ternate.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- e. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Pendapatan Daerah dikelompokkan kedalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017

Uraian Pendapatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
a. Pendapatan Asli Daerah	117.400.328.450,00	93.295.499.070,89	79,47
Hasil pajak daerah	46.150.000.000,00	45.509.869.709,00	98,61
Hasil retribusi daerah	28.207.870.850,00	16.816.067.938,00	59,61
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.200.000.000,00	573.704.420,00	26,08

Lain-lain PAD yang sah	40.842.457.600,00	30.395.857.003,89	74,42
b. Pendapatan Transfer	853.964.116.069,00	830.488.669.731,00	97,25
Bagi hasil pajak	22.002.073.000,00	16.960.129.594,00	77,08
Bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam)	5.660.759.000,00	2.772.517.547,00	48,98
Dana Alokasi Umum	610.438.912.000,00	610.438.912.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	177.605.042.000,00	166.632.969.350,00	93,82
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.757.330.069,00	26.184.141.240,00	85,13
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Pendapatan hibah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Daerah	991.364.444.519,00	943.784.168.801,89	95,20

Sumber Data : BPKAD Kota Ternate 2017

3.4.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Ternate 2016 - 2021 bahwa kebijakan penetapan besaran pagu belanja daerah dirumuskan dan disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari setiap program yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang tersedia, diharapkan program-program yang dibiayai akan memberi dampak positif dan daya ungkit yang signifikan dalam memecahkan berbagai permasalahan pembangunan di Kota Ternate.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah.

Belanja Daerah dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah :			
a. Belanja Operasi	805.224.148.330,00	745.708.919.889,62	92,61
Belanja Pegawai	485.812.967.326,00	459.064.674.108,00	94,49
Belanja Barang dan Jasa	281.559.371.284,00	256.051.482.061,62	90,94
Belanja Hibah	18.351.200.000,00	11.267.000.000,00	61,40
Belanja Bantuan Sosial	18.687.500.000,00	18.512.654.000,00	99,06
Belanja Bantuan Keuangan	813.109.720,00	813.109.720,00	100,00
b. Belanja Modal	219.638.670.189,00	191.213.741.138,00	87,06
Belanja Tanah	12.714.087.619,00	11.465.802.619,00	90,18
Belanja Peralatan dan Mesin	39.735.836.858,00	37.787.648.596,00	95,10
Belanja Gedung dan Bangunan	99.868.544.736,00	91.837.202.573,00	91,96
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.297.837.980,00	48.132.680.950,00	73,71
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.022.362.996,00	1.990.406.400,00	98,42
c. Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	6.322.690.100,00	97,27
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	6.322.690.100,00	97,27
Jumlah Belanja Daerah	1.031.362.818.519,00	943.245.351.127,62	91,46

Sumber Data : BPKAD Kota Ternate 2017

3.4.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diarahkan untuk menutup selisih antara penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode

akuntansi serta untuk membentuk modal pemerintah guna mendorong terciptanya likuiditas keuangan daerah melalui kebijakan :

1. Memprioritaskan pembiayaan pengeluaran terhadap sisa kurang perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
2. Melakukan pembiayaan atas pengeluaran investasi melalui kerja sama operasi dengan BUMD dan Swasta di daerah.

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang harus digunakan untuk menutup defisit.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 Per 31 Desember 2017

Uraian Pembiayaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a. Penerimaan Daerah	42.998.374.000,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	42.998.374.000,00	0,00	0,00
b. Pengeluaran Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan NETTO	39.998.374.000,00	(3.000.000.000,00)	(7,50)

Sumber Data : BPKAD Kota Ternate 2017

BAB IV

P E N U T U P

Hasil pengukuran kinerja tahun 2017 diketahui rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate mencapai 103,46% yang bermakna **Baik Sekali**. Dari 15 (lima belas) Sasaran, dengan 51 (lima puluh satu) Indikator Sasaran Pemerintah Kota Ternate Tahun 2017, sebanyak 24 indikator sasaran atau 47,06% berada pada katagori Baik Sekali, 26 indikator sasaran atau 50,98% katagori Baik dan 1 indikator sasaran atau 1,96% katagori Cukup.

Namun demikian terdapat 8 (delapan) indikator sasaran yang realisasinya di bawah target, yaitu:

1. Angka Partisipasi kasar SMP/MTs, nilai capaiannya 99,02%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kedepan akan terus dilakukan peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga terjadi peningkatan kualitas sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Ternate dan memberikan kemudahan dalam pembukaan sekolah unggulan tertentu yang belum ada di Kota Ternate.

2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, nilai capaiannya 98,44%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kedepan akan terus dilakukan peningkatan mutu guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga terjadi peningkatan kualitas sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Ternate dan memberikan kemudahan dalam pembukaan sekolah unggulan tertentu yang belum ada di Ternate.

3. Jumlah guru SD dengan kualitas S1/D4, nilai capaian 70,95%.

Untuk meningkatkan nilai capaian kedepan adalah melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan pemberian bantuan beasiswa bagi guru yang akan melanjutkan studi dan

memberikan dorongan kepada guru untuk melanjutkan pendidikan S1/D4 agar mereka bisa memperoleh tunjangan sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan pemberian tunjangan sertifikasi.

4. Tingkat pengangguran terbuka nilai capaiannya di bawah target yaitu 78,20%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka kedepan akan diberikan kemudahan penerbitan ijin usaha dan menciptakan kondisi yang kondusif baik dari segi sosial, politik dan keamanan. Juga dilakukan pendekatan ke pelaku usaha untuk memprioritaskan menerima tenaga kerja yang mempunyai KTP Kota Ternate.

5. Cakupan ketersediaan air bersih dengan nilai capaian 98,51%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, kedepan akan dilakukan pembangunan sumur baru untuk memenuhi kebutuhan air dan memperluas jaringan perpipaan untuk menjangkau kewilayah pemukiman baru.

6. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK nilai capaian 80.41%.

Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, adalah memberikan sanksi kepada pimpinan SKPD yang lamban dalam menyelesaikan temuan dan memberikan sanksi tidak mengikutsertakan rekanan yang tidak menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan APIP dan juga hasil pemeriksaan BPK pada pengadaan barang/jasa pada masa yang akan datang. Selain itu mengefektifkan peran Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pemerintah Kota Ternate dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

7. Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan Bahasa Daerah Ternate dengan nilai capaian 98,88%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dilakukan seleksi guru Bahasa Daerah Ternate untuk mengisi kekosongan Guru Bahasa Daerah Ternate di sejumlah sekolah.

8. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya, nilai capaian 93.,58%.

Untuk mengatasi permasalahan ini kedepan, maka akan diberikan bantuan kepada petani budidaya ikan air tawar berupa pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, bantuan sarana tambak, dan bantuan benih ikan.

Kelemahan tersebut di atas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2017, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ternate, 27 Maret 2018

Plt. Walikota Ternate



H. Abdullah Tahir, S.H.

LAMPIRAN I
PERNGUKURAN KINERJA

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Angka melek huruf	96,96 %	97,75 %	100,81
	2 Angka rata-rata lama sekolah	9 Tahun	9 Tahun	100,00
	3 Angka partisipasi kasar SD/MI	95,43 %	96,08 %	100,68
	4 Angka partisipasi kasar SMP/MTS	78,66 %	77,89 %	99,02
	5 Angka partisipasi murni SD/MI	82,22 %	83,37 %	101,40
	6 Angka partisipasi murni SMP/MTs	76,51 %	75,32 %	98,44
	7 Jumlah guru SD dengan kualifikasi S1/D4	1.160 Guru	823 Guru	70,95
	8 Cakupan angka partisipasi PAUD	85 %	98,7 %	116,12
Rata-Rata Capaian Sasaran 1				98,43
2 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan	9 Angka kematian Ibu (per 1000 KH)	1 %	1 %	100,00
	10 Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	5,5 %	4,1 %	125,45
	11 Angka usia harapan hidup	70,37 Tahun	70,37 Tahun	100,00
	12 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization	88 %	93 %	105,68
	13 <i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	1 %	0,8 %	120,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 2				110,23
3 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14 Tingkat pengangguran terbuka	6,33 %	7,71 %	78,20
	15 Tingkat kemiskinan	2,8 %	2,73 %	102,50
Rata-Rata Capaian Sasaran 3				90,35
4 Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial	16 Persentase PMKS yang tertangani	3,40 %	3,46 %	101,76
	17 Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan kesehatan	100 %	100 %	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 4				100,88
5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	18 Cakupan Jalan Kondisi Baik	24,06 Km	26,56 Km	110,39
	19 Cakupan pelayanan air bersih	80,00 %	78,81 %	98,51
	20 Cakupan Jembatan Kondisi Baik	1,58 Km	1,58 Km	100,00
	21 Cakupan ketersediaan Jaringan Listrik	97,4 %	97,4 %	100,00
Rata-Rata Capaian Sasaran 5				102,23

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate	WTP Opini	WTP Opini	100,00
	23 Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP	CC Nilai	CC Nilai	100,00
	24 Nilai/Peringkat LPPD	3 Nilai	3,08 Nilai	102,67
	25 Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	50 %	40,21 %	80,41
	Rata-Rata Capaian Sasaran 6			
7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	26 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate	78 Nilai	78,09 Nilai	100,12
	Rata-Rata Capaian Sasaran 7			
8 Terwujudnya pelestarian budaya lokal	27 Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya	2 Kali	2 Kali	100,00
	28 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	90 %	88,99 %	98,88
	29 Jumlah seni budaya yang dilestarikan	6 Jenis	6 Jenis	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran 8			
9 Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	30 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100 %	100 %	100,00
	31 Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina	150 TPQ	200 TPQ	133,33
	32 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali	4 Kali	100,00
	33 Juara Umum Kegiatan STQ/MTQ	1 Juara	1 Juara	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran 9			
10 Meningkatnya infrastruktur jasa dan perdagangan	34 Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	70 %	70 %	100,00
	35 Jumlah gudang nonsistem yang tersedia	10 Buah	15 Buah	150,00
	36 Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik	42,86 %	42,86 %	100,00
	37 Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik	66,67 %	66,67 %	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran 10			
11 Meningkatnya aktivitas jasa dan perdagangan	38 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24 %	24,94 %	103,92
	39 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,5 %	3,52 %	100,57
	40 Laju Inflasi	1,91 %	1,97 %	96,86
	41 Pertumbuhan industri	30 %	34,52 %	115,07
	Rata-Rata Capaian Sasaran 11			

Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
12 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	42 Jumlah produksi perikanan tangkap	30.000 Ton	31.630 Ton	105,43
	43 Jumlah produksi perikanan budidaya	35.200 Ton	32.939 Ton	93,58
	44 Nilai Tukar Nelayan	105 NTN	117 NTN	111,43
	45 Rata-Rata Pendapatan Nelayan	2.500.000 Rp	2.700.000 Rp	108,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran 12			
13 Meningkatnya perlindungan wilayah pesisir	46 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove	1,50 %	1,00 %	133,33
	47 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang	1,7 %	1,5 %	111,76
	Rata-Rata Capaian Sasaran 13			
14 Meningkatnya kunjungan wisata	48 Jumlah kunjungan wisatawan lokal	270.000 orang	278.200 orang	103,04
	49 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	4.800 orang	4.870 orang	101,46
	Rata-Rata Capaian Sasaran 14			
15 Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	50 Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	35 Tempat	35 tempat	100,00
	51 Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan	1,45 %	1,45 %	100,00
	Rata-Rata Capaian Sasaran 15			
Rata-Rata Capaian Sasaran				103,46

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA



WALIKOTA TERNATE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TERNATE

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 16 Februari 2017

WALIKOTA TERNATE



Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1 Angka melek huruf	96,96 %
	2 Angka rata-rata lama sekolah	9 Tahun
	3 Angka partisipasi kasar SD/MI	95,43 %
	4 Angka partisipasi kasar SMP/MTS	78,66 %
	5 Angka partisipasi murni SD/MI	82,22 %
	6 Angka partisipasi murni SMP/MTs	76,51 %
	7 Jumlah guru SD dengan kualifikasi S1/D4	1.160 Guru
	8 Cakupan angka partisipasi PAUD	85 %
2 Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas kesehatan	9 Angka kematian Ibu (per 1000 KH)	1 %
	10 Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	5,5 %
	11 Angka usia harapan hidup	70,37 Tahun
	12 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization	88 %
	13 <i>Annual Parasite Incidence</i> (API)	1 %
3 Meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14 Tingkat pengangguran terbuka	6,33 %
	15 Tingkat kemiskinan	2,8 %
4 Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial	16 Persentase PMKS yang tertangani	3,40 %
	17 Persentase masyarakat miskin yang telah memperoleh jaminan kesehatan	100 %
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	18 Cakupan Jalan Kondisi Baik	24,06 Km
	19 Cakupan pelayanan air bersih	80,00 %
	20 Cakupan Jembatan Kondisi Baik	1,58 Km
	21 Cakupan ketersediaan Jaringan Listrik	97,4 %
6 Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	22 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate	WTP Opini
	23 Nilai/Predikat hasil evaluasi SAKIP	CC Nilai
	24 Nilai/Peringkat LPPD	3 Nilai
	25 Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	50 %
7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	26 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Pemerintah Kota Ternate	78 Nilai
8 Terwujudnya pelestarian budaya lokal	27 Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival/even seni dan budaya	2 Kali
	28 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	90 %
	29 Jumlah seni budaya yang dilestarikan	6 Jenis
9 Terwujudnya masyarakat Kota Ternate yang agamais	30 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100 %
	31 Jumlah taman pengajian Al-Quran yang dibina	150 TPQ
	32 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali
	33 Juara Umum Kegiatan STQ/MTQ	1 Juara
10 Meningkatkan infrastruktur jasa dan perdagangan	34 Persentase Pasar rakyat dalam kondisi baik	70 %
	35 Jumlah gudang nonsistem yang tersedia	10 Buah
	36 Persentase Pelabuhan Rakyat dalam kondisi baik	42,86 %
	37 Jumlah Terminal Angkutan Darat dalam kondisi baik	66,67 %

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
11 Meningkatkan aktivitas jasa dan perdagangan	38 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	24 %	
	39 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,5 %	
	40 Laju Inflasi	1,91 %	
	41 Pertumbuhan industri	30 %	
12 Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	42 Jumlah produksi perikanan tangkap	30.000 Ton	
	43 Jumlah produksi perikanan budidaya	35.200 Ton	
	44 Nilai Tukar Nelayan	105 NTN	
	45 Rata-Rata Pendapatan Nelayan	2.500.000 Rp	
13 Meningkatkan perlindungan wilayah pesisir	46 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove	1,50 %	
	47 Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang	1,7 %	
14 Meningkatkan kunjungan wisata	48 Jumlah kunjungan wisatawan lokal	270.000 orang	
	49 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	4.800 orang	
15 Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata Kota Ternate	50 Jumlah tempat wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	35 Tempat	
	51 Persentase peningkatan jumlah tempat hunian wisatawan	1,45 %	

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengembangan Data/Informasi	804.675.900,00	Bappelitbangda
2	Program Kerjasama Pembangunan	1.550.788.000,00	Bappelitbangda
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	342.950.000,00	Bappelitbangda
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.306.727.980,00	Bappelitbangda
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	417.380.960,00	Bappelitbangda
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	743.999.710,00	Bappelitbangda
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	979.357.206,00	Bappelitbangda
8	Program Pengembangan dan Pemetaan Kawasan Strategis Sentra Ternate Utara, Tengah, Selatan dan Pulau Berbasis	478.746.795,00	Bappelitbangda
9	Prog. Pembangunan Jalan dan Jembatan	20.620.610.000,00	Dinas PUPR
10	Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.119.471.000,00	Dinas PUPR
11	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	6.181.745.000,00	Dinas PUPR
12	Prog. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28.398.156.545,00	Dinas PUPR
13	Prog. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1.933.400.000,00	Dinas PUPR
14	Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.719.823.000,00	Dinas PUPR
15	Prog. Pengendalian Banjir	2.416.379.800,00	Dinas PUPR
16	Prog. Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	56.159.790.750,00	Dinas PUPR
17	Program Perencanaan Tata Ruang	697.089.000,00	Dinas PUPR
18	Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	2.304.500.196,00	Dinas Dikbud
19	Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	16.335.151.800,00	Dinas Dikbud
20	Prog. Pendidikan Non Formal	523.855.800,00	Dinas Dikbud
21	Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	852.636.480,00	Dinas Dikbud
22	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	237.200.000,00	Dinas Dikbud
23	Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.877.267.240,00	Dinas Dikbud
24	Prog. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar	1.027.668.000,00	Dinas Dikbud
25	Program Peningkatan dan Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan yang murah dan berkualitas	16.932.168.482,00	Dinas Dikbud

No.	Program	Anggaran	Keterangan
26	Program Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur Pendukung untuk mendorong	3.033.621.000,00	Dinas Dikbud
27	Prog. Penyediaan Biaya Operasional dan administrasi Balai Bahasa Daerah	402.359.150,00	Dinas Dikbud
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	260.700.000,00	Dinas Dikbud
29	Program Penguatan Nilai -Nilai Keagamaan dan Revitalisasi Cagar Budaya serta Infrastruktur pendukung untuk mendorong	384.450.000,00	Dinas Dikbud
30	Prog. Pendidikan Non Formal	479.236.800,00	SKB
31	Prog. Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.045.899.590,00	Dinas Kesehatan
32	Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat	7.304.239.500,00	Dinas Kesehatan
33	Prog. Pengawasan Obat dan Makanan	238.310.000,00	Dinas Kesehatan
34	Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	339.770.000,00	Dinas Kesehatan
35	Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat	203.157.710,00	Dinas Kesehatan
36	Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat	315.450.000,00	Dinas Kesehatan
37	Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.351.897.400,00	Dinas Kesehatan
38	Prog. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.220.762.200,00	Dinas Kesehatan
39	Prog. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	10.888.875.795,00	Dinas Kesehatan
40	Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
41	Prog. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	180.213.100,00	Dinas Kesehatan
42	Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.319.110.580,00	Dinas Kesehatan
43	Prog. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	2.088.528.900,00	Dinas Kesehatan
44	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	129.848.723,00	Dinas PPPA
45	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	980.141.000,00	Dinas PPPA
46	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	80.000.000,00	Dinas PPPA
47	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	938.883.670,00	Dinas PPPA
48	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.000.000,00	Disnaker
49	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.599.900.000,00	Disnaker
50	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1.556.475.000,00	Disnaker
51	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	545.875.000,00	Dinas Sosial
52	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	284.109.800,00	Dinas Sosial
53	Program Pembinaan Anak Terlantar	213.230.000,00	Dinas Sosial
54	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	153.574.000,00	Dinas Sosial
55	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	81.000.000,00	Dinas Sosial
56	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	276.990.000,00	Dinas Sosial
57	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	101.305.000,00	Dinas Koperasi dan UKM
58	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	142.272.100,00	Dinas Koperasi dan UKM
59	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	119.143.740,00	Dinas Koperasi dan UKM
60	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	180.004.630,00	Dinas Koperasi dan
61	Program Pembamngunan dan Pemerataan Infrastruktur Jasa dan Perdagangan serta Pemberdayaan UMKM berbasis	345.664.500,00	Dinas Koperasi dan UKM
62	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	194.083.840,00	Dinas Koperasi dan
63	Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.322.500.000,00	Dinas Pariwisata
64	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	236.500.000,00	Dinas Pariwisata

No.	Program	Anggaran	Keterangan
65	Program Pengembangan Kemitraan	365.000.000,00	Dinas Pariwisata
66	Prog. Pengembangan Sarana Pariwisata	2.060.000.000,00	Dinas Pariwisata
67	Program Pengembangan Pemasaran Ekonomi Kreatif	109.550.000,00	Dinas Pariwisata
68	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	910.358.260,00	Badan Kesbangpol
69	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	327.207.000,00	Setda
70	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan	3.689.450.000,00	Setda
71	Belanja Bantuan Sosial	13.237.000.000,00	BPKAD
72	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Kota	74.511.500,00	Kec. Ternate Utara
73	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Kota	72.827.000,00	Kec. Ternate Tengah
74	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Kota	129.999.680,00	Kec. Ternate Selatan
75	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Pulau	74.999.680,00	Kec. Pulau Ternate
76	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Pulau Moti	103.193.995,00	Kec. Pulau Moti
77	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Pulau Hiri	90.000.000,00	Kec. Pulau Hiri
78	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Kec. Pulau	151.647.500,00	Kec. Pulau Batang Dua
79	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	849.035.000,00	DKP
80	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	121.000.000,00	DKP
81	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	46.690.100,00	DKP
82	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	50.000.000,00	DKP
83	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.114.166.996,00	DKP
84	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.139.594.400,00	DKP
85	Program Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah berbasis Maritim dan Pesisir	249.000.000,00	DKP
86	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	192.000.000,00	Disperindag
87	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	363.850.800,00	Disperindag
88	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	532.960.000,00	Disperindag
89	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	72.600.000,00	Disperindag
90	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	14.074.576.000,00	Disperindag
91	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.496.480.000,00	Disperindag
92	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	77.760.000,00	Disperindag
93	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	325.000.000,00	Dinas Perhubungan
94	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.414.087.619,00	Dinas Perhubungan

Ternate, Februari 2017

WALIKOTA TERNATE



Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

LAMPIRAN III
PERNYATAAN TELAH DI REVIU
OLEH INSPEKTORAT KOTA TERNATE



PEMERINTAH KOTA TERNATE
INSPEKTORAT

Jalan Jati (Perumnas) No. 222 Telp. (0921) 3128069
Fax. (0921) 3128592 e-mail: inspektoratkt@gmail.com
TERNATE

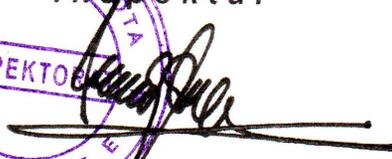
Kode Pos: 97716

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kota Ternate.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ternate, 26 Maret 2018
Inspektur

Rohani Parjab Mahli, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661014 199203 2 007

**BENTUK PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA TERNATE
DI TAHUN 2017**

No	Bentuk Penghargaan	Kota	Tanggal, bulan, tahun	Keterangan
1	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Ternate	23 Mei 2017	Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara Opini WTP ini juga karena Pemerintah Kota dinilai laporan keuangan sudah memenuhi empat kriteria diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern
2	Penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM	Makassar	11 Juli 2017	Oleh Kementerian Koperasi dan UMKM RI Karena dinilai memiliki jasa untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Ternate, dan walikota Ternate adalah salah satu kepala daerah di Maluku Utara yang mendapatkan penghargaan tersebut
3	Penghargaan atas Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik untuk Regional Maluku dan Maluku Utara	Yogyakarta	07 September 2017	Oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Karena pemkot Ternate dianggap mampu mengelola keuangan secara lebih akuntabel dan transparan
4	Penghargaan kategori Penyelenggaraan dengan Etape Wisata Terbaik pada Kegiatan Gowes Nusantara 2017	Magelang	09 September 2017	Oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk kategori kemas destinasi wisata terbaik dalam menggelorakan Ayo Olahraga pada GPN 2017 yang digelar Dispora Kota Ternate, pada bulan Juli lalu

5	Penghargaan Kota Layak Pemuda	Padang	28 Oktober 2017	<p>Oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga RI</p> <p>Kota Ternate sendiri menerima penghargaan dengan kategori Utama lantaran ada beberapa hal. Diantaranya, Ada regulasi yang mengatur tentang kepemudaan, keberpihakan pemerintah Kota Ternate dalam pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda, keberpihakan pemerintah pada penganggaran dalam APBD terkait dengan kepemudaan, serta ada bantuan atau fasilitas pemerintah untuk kelompok wirausaha pemuda dan fasilitas OKP dan kepemudaan lainnya</p>
6	Penghargaan sebagai Kota Peduli HAM	Solo	10 Desember 2017	<p>Oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI</p> <p>Karena Kota Ternate dinilai telah bersinergi dalam upaya dan menjunjung tinggi HAM pada setiap program kegiatan dan aktivitas di tengah-tengah masyarakat.</p> <p>“Penghargaan ini juga merupakan bukti dan pengakuan pemerintah pusat bahwa di Kota Ternate tidak terjadi pelanggaran HAM yang mengakibatkan rusaknya kebersamaan di antara masyarakat kota Ternate”</p>
7	Penghargaan dari PMI pusat	Bogor	17 September 2017	<p>Oleh ketua umum PMI Pusat Karena dinilai sebagai kepala daerah yang berhasil dalam membina dan mengembangkan PMI di Kota Ternate</p>

2017

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA TERNATE

